

**PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DARI KEBERADAAN BAKAMLA RI (INDONESIA COAST GUARD) DENGAN TOLOK UKUR INDEKS KEAMANAN LAUT NASIONAL (IKLN)**

**Rinaldo Dwi Putra<sup>1</sup>, Sayed Fauzan Riyadi<sup>2</sup>, Ilham Yuri Nanda<sup>3</sup>, Anza Ronaza Bangun<sup>4</sup>, Euis Ammelia<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email Korespondensi: rinaldodwiputra@umrah.ac.id

Email: sayedfauzan@umrah.ac.id; ilhamyurinanda@umrah.ac.id; anzabangun@umrah.ac.id; euisammelia@umrah.ac.id

**ABSTRACT**

This community engagement programs activity aims to provide strategic reinforcement to maritime security governance through the optimization of the National Maritime Security Index (IKLN). Indonesia faces complex challenges in managing its jurisdictional waters, where maritime security stability serves as the primary foundation for national economic sustainability. As the leading sector, Bakamla RI (Indonesia Coast Guard) plays a crucial role in synergizing security, safety, and law enforcement in Indonesian maritime. The program was conducted using Focus Group Discussions (FGD) to map the relevance between IKLN parameters and the protection of maritime resources. The results indicate that strengthening the dimension of legal certainty within the IKLN not only elevates regional security standards but also serves as an instrument for safeguarding state revenue. Stable maritime security contributes to optimizing Non-Tax State Revenue (PNBP) in the fisheries, and investment. Consequently, the synchronization of Bakamla RI's performance and the standardization of the IKLN are absolute prerequisites for realizing a sustainable Blue Economy paradigm in Indonesia.

**Keywords:** Maritime security, IKLN, Bakamla RI, Blue economy.

**ABSTRAK**

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penguatan strategis terhadap tata kelola keamanan laut melalui optimalisasi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola wilayah yurisdiksinya, di mana stabilitas keamanan laut menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Sebagai *leading sector*, Bakamla RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) memiliki peran krusial dalam menyinergikan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memetakan relevansi antara parameter IKLN dengan perlindungan sumber daya maritim. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan dimensi kepastian hukum dalam IKLN tidak hanya meningkatkan standar keamanan regional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penyelamatan pendapatan negara. Keamanan laut yang stabil secara langsung berkontribusi pada peningkatan kas negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan, dan investasi. Dengan demikian, sinkronisasi kinerja Bakamla RI dan standarisasi IKLN menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan paradigma Ekonomi Biru yang berkelanjutan di Indonesia.

**Kata kunci:** Keamanan maritim, IKLN, Bakamla RI, Ekonomi biru.

## PENDAHULUAN

Keamanan maritim Indonesia merupakan isu strategis yang bersinggungan antara kedaulatan nasional, stabilitas kawasan, dan kemakmuran ekonomi yang dapat diidentifikasi melalui tolok ukur Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). Tanpa IKLN sebagai alat ukur, kebijakan maritim sering kali bersifat reaktif dan tumpang tindih, karena IKLN ini berkaitan erat dengan posisi geografis. Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang diakui oleh UNCLOS 1982, keamanan maritim bagi Indonesia bukan sekadar isu sektoral, melainkan pilar utama dari visi Poros Maritim Dunia. Keberhasilan dalam mengelola keamanan maritim berdampak langsung pada penyelamatan keuangan negara dari aktivitas ilegal yang merugikan kas negara.

Poros Maritim Dunia menjadi sebuah upaya untuk membangun kembali budaya maritim, mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, dan membangun infrastruktur konektivitas. Indonesia harus mampu mentransformasi kekayaan alam laut menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Poros Maritim Dunia terdapat lima pilar di dalamnya, antara lain: (1) pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; (2) komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut; (3) komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim (tol laut); (4) diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan; dan (5) pembangunan kekuatan pertahanan maritim (Manggala & Airlangga, 2025).

Kerugian kas negara merupakan dampak turunan paling nyata dari ketidakstabilan keamanan maritim. Dalam konteks Indonesia, kebocoran kas negara terjadi tidak hanya melalui hilangnya aset fisik seperti pencurian ikan dan sumber daya mineral, tetapi juga melalui biaya pemulihan ekosistem. Pencurian ikan bukan hanya masalah kedaulatan, tetapi kebocoran anggaran yang massif, artinya dengan tindakan tegas terhadap kapal asing ilegal di Indonesia tidak hanya memulihkan hasil laut tetapi juga meningkatkan keuntungan industri perikanan domestik secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa keamanan maritim adalah investasi ekonomi, bukan sekadar biaya belanja negara (Rudolph et al., 2020). Langkah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim artinya mencegah dari berbagai ancaman sekaligus meningkatkan ekonomi biru (*blue economy*) yang dapat menjadi mesin pertumbuhan baru bagi Indonesia.

Keamanan maritim lebih luas dari sudut pandang militer, dan terdapat empat pilar di dalamnya, antara lain: (1) Keamanan nasional demi melindungi kedaulatan dari agresi atau intrusi asing; (2) Keamanan kelautan yang berfokus pada keselamatan navigasi dan perlindungan terhadap pembajakan; (3) Ekonomi maritim untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut dan jalur perdagangan; dan (4) Lingkungan laut terkait pencegahan polusi dan kerusakan habitat laut (Bueger, 2015). Bagi Indonesia, keempat pilar ini sangat penting. Pelanggaran terhadap salah satu pilar, misalnya IUU Fishing, secara otomatis mengancam ekonomi dan kedaulatan nasional.

Keselarasannya antara ekonomi biru dan keamanan maritim merupakan hubungan simbiotik dalam tata kelola laut modern. Keamanan maritim menjadi prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi biru, sementara ekonomi biru yang stabil akan mengurangi insentif bagi pelaku kejahatan di laut. Ekonomi biru tidak dapat berkembang dalam lingkungan yang tidak stabil. Keamanan maritim berfungsi sebagai *enabler* (pendorong) yang menjamin keselamatan jalur perdagangan, infrastruktur energi lepas pantai, dan kelestarian stok ikan dari praktik pencurian ikan. Tanpa keamanan, risiko investasi di sektor maritim akan turun drastis yang berujung pada kegagalan pemanfaatan ekonomi biru (Bueger, 2015).

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) sebagai lembaga yang mengemban fungsi *coast guard* dalam keamanan maritim Indonesia, Bakamla RI memiliki peran sentral sebagai koordinator di tengah banyaknya instansi yang memiliki kewenangan di laut. Peran Bakamla RI diatur secara spesifik dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Bakamla RI berperan dalam fungsi koordinasi (*the hub*) yang menyinergikan berbagai instansi (TNI AL, Polairud, KKP, Bea Cukai, dan Perhubungan), Bakamla RI memiliki wewenang untuk melaksanakan pengejaran, penghentian, pemeriksaan, penangkapan, dan penyerahan kapal kepada instansi terkait dalam kasus IUU Fishing dengan menindak kapal asing yang mencuri ikan di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia, penyelundupan dengan mencegah masuknya

narkoba, senjata, maupun barang ilegal lainnya melalui jalur laut, dan perompakan demi menjaga keamanan jalur pelayaran strategis dari aksi bajak laut atau pencurian di atas kapal. Bakamla RI fokus pada keamanan terkait ketertiban hukum dengan memberikan bantuan dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) serta penanggulangan kecelakaan laut, perlindungan lingkungan melalui pemantauan dan menindak pelaku pencemaran laut, seperti pembuangan limbah ballast water atau tumpahan minyak dari kapal tangker, serta diplomasi maritim (*coast guard diplomacy*) dengan peran sebagai wajah Indonesia dalam kerja sama internasional antara penjaga laut.

## METODE

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini melalui *Focus Group Discussion* (FGD) via *Zoom Meeting* memberikan landasan metodologis yang kuat untuk memahami kedalaman masalah sosial secara kontekstual. Melalui FGD terjadi interaksi dua arah yang menggali perspektif, pengalaman, dan nilai-nilai lokal. Melalui pendekatan kualitatif dalam penulisan ini, program pengabdian dapat dirancang berdasarkan kebutuhan riil di lapangan (*bottom-up*), sehingga lebih tepat guna dan memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi. FGD menjadi teknik pengumpulan data yang paling krusial dalam menjembatani penulisan kualitatif dengan program Pengabdian kepada Masyarakat. FGD memungkinkan terjadinya dialektika antar akademisi dan *stakeholder* untuk merumuskan prioritas masalah sekaligus menguji akseptabilitas program yang akan dijalankan dan rekomendasi strategis mengenai penguatan Bakamla RI demi efisiensi belanja negara jangka panjang. Melalui interaksi FGD, dinamika sosial yang kompleks dapat terurai secara lebih efisien, sehingga tercipta konsensus dan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program pengabdian yang sedang diimplementasikan.

## PEMBAHASAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini memiliki kebaruan dalam upaya sintesis pemahaman tentang diplomasi maritim, tata kelola keamanan, dan juga kebijakan keamanan laut. Beberapa literatur terdahulu. Hanya mengeksplorasi dimensi keamanan kebijakan kelautan Indonesia dengan melihat bagaimana aktor maritim utama di negara Indonesia menunjukkan pemahaman yang beragam tentang apa itu keamanan maritim. Ekonomi politik sektor perikanan Indonesia dengan melihat perjuangan domestik antara bisnis dan negara dalam pembuatan kebijakan kelautan Indonesia (Scarpello, 2020). Pengabdian kepada Masyarakat ini berkontribusi pada literatur terkait studi maritim dengan membawa keamanan maritim dalam meningkatkan pemahaman kita tentang kebijakan kelautan Indonesia.

IKLN dikembangkan oleh Bakamla RI bersama Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia) dan akademisi sebagai instrumen untuk mengukur kondisi keamanan dan keselamatan laut Indonesia. IKLN digunakan sebagai tolok ukur capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024 dan instrumen untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap jalur perdagangan Indonesia, yang secara langsung berdampak pada efisiensi ekonomi dan perlindungan aset negara (Bakamla, 2023). Dalam standar operasional Bakamla RI, terdapat enam dimensi utama yang menjadi parameter pengukuran IKLN: (1) Kapasitas patroli terkait ketersediaan dan kesiapan unsur seperti kapal dan pesawat di wilayah operasional; (2) Kapasitas pemantauan terkait kemampuan teknologi surveilans (*Maritime Domain Awareness*) melalui radar, satelit, dan sensor; (3) Pengendalian kejahatan terkait efektivitas dalam menekan angka kejahatan transnasional (perompakan, penyelundupan, perdagangan manusia); (4) Pengendalian pelanggaran hukum, artinya tegas dalam menangani pelanggaran aturan perairan, seperti IUU Fishing; (5) Pengendalian pencemaran terkait pemantauan dan penanganan limbah atau tumpahan minyak di laut; dan (6) Pengendalian keselamatan di laut terkait respons terhadap kecelakaan laut dan keselamatan navigasi bagi kapal niaga serta nelayan.

Secara tradisional, keamanan maritim sering kali hanya dikaitkan dengan kekuatan militer dan perlindungan batas wilayah. Dalam konteks Indonesia, keamanan maritim bukan sekadar urusan perang,

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

86

Indexed



SINTA 4



melainkan upaya menjamin laut bebas dari ancaman kekerasan, navigasi yang aman, serta perlindungan terhadap sumber daya alam. Laut bukan lagi sekadar medan tempur atau batas wilayah, melainkan ruang multidimensi yang memengaruhi stabilitas global. Keamanan maritim berevolusi dari paradigma militeristik (*sea power*) menuju pendekatan holistik. Tanpa stabilitas, potensi ekonomi hanya akan menjadi angka di atas kertas tanpa bisa ditarik ke kas negara. Pencurian ikan oleh kapal asing (*illegal fishing*) adalah bentuk kebocoran pendapatan terbesar. Keamanan laut yang stabil melalui patroli mandiri dan gabungan oleh Bakamla RI dan TNI AL memastikan ikan ditangkap oleh kapal berizin yang membayar pungutan hasil perikanan kepada negara. Banyak juga komoditas seperti batubara atau nikel yang dikirim melalui jalur laut. Keamanan maritim mencegah praktik *under-reporting* (pelaporan jumlah barang yang lebih sedikit dari aslinya) atau penyelundupan keluar jalur resmi yang menghindari pajak ekspor.

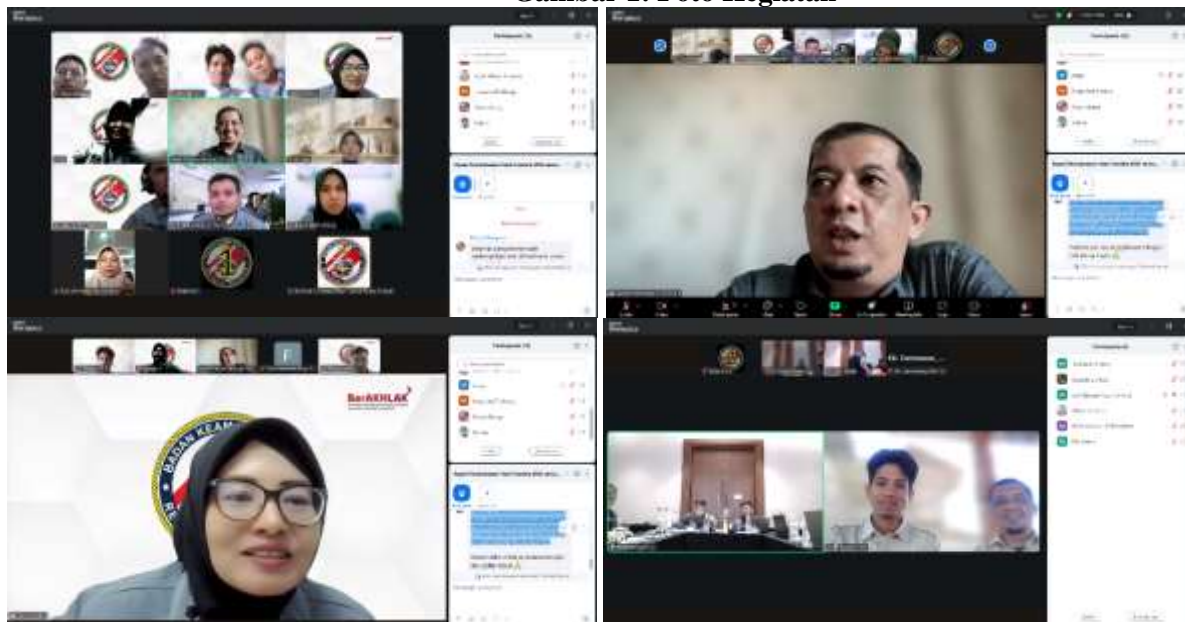
Ekonomi biru tidak akan dapat berkembang tanpa adanya jaminan keamanan, sementara penjagaan laut yang efektif memerlukan dukungan ekonomi yang stabil. Penjagaan laut yang ketat juga menjadi kunci untuk menghentikan sumber daya yang gagal diserap (Wenhai et al., 2019). Ekonomi biru adalah pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, penghidupan, pekerjaan, sambil menjaga kesehatan ekosistem laut (Karupiah, 2025). Ekonomi biru meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sejalan dengan pengurangan risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (Priye et al., 2025). Ekonomi biru juga menjelaskan pendapatan dari perikanan dan akuakultur, transportasi maritim, energi terbarukan lepas pantai, pariwisata pesisir & bahari, bioteknologi laut, serta ekstraksi sumber daya non-hayati seperti minyak, gas, dan penambangan laut dalam (María et al., 2021).

Tata kelola maritim (*maritime governance*) sebagai pengaturan hubungan antara berbagai badan otoritas di laut untuk menciptakan ketertiban. Ia menekankan pentingnya *Architecture of Security*, di mana instansi seperti *Coast Guard* bertindak sebagai eksekutor kebijakan yang menyelaraskan aturan nasional dengan rezim global (Vreÿ, 2017). Tanpa tata kelola yang kuat, konsep ekonomi biru tidak akan bisa berjalan. Kontribusi laut ke ekonomi nasional masih relatif kecil dibanding potensi, karena keterbatasan SDM, infrastruktur, dan tata kelola. Tata kelola berfungsi sebagai "perangkat aturan main" (*rules of the game*) untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut tidak merusak keberlanjutan masa depan (Dahuri, 2015). Nilai ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan minimal 8,22 triliun–1,2 triliun dolar AS per tahun dalam berbagai estimasi (Farhani, 2022).

Eksistensi otoritas Bakamla RI di wilayah perairan juga menjadi penjamin dipatuhinya regulasi lingkungan, seperti larangan pembuangan limbah dari kapal. Dalam paradigma ekonomi biru, terjaganya kebersihan laut merupakan aset strategis yang mendukung akselerasi sektor pariwisata bahari serta pengembangan bioteknologi kelautan. Selain itu, dari aspek kesejahteraan sosial, stabilitas keamanan laut memberikan rasa aman bagi komunitas nelayan dan pelaku usaha pariwisata kecil (Pauli, 2010). Patroli mandiri dan gabungan yang dilakukan Bakamla RI sepanjang tahun 2024 berhasil meminimalisir kerugian serta sebagai aksi penyelamatan keuangan negara. Ketika laut terjaga dari ancaman kejahatan transnasional dan perusakan ekosistem, sektor strategis lain seperti pariwisata bahari, logistik laut, dan energi lepas pantai dapat beroperasi secara optimal tanpa gangguan sabotase.

Penyelamatan keuangan negara melalui patroli laut pada akhirnya bertransformasi menjadi modal pembangunan yang berkelanjutan, yang manfaat ekonominya mengalir kembali kepada masyarakat pesisir yang lebih merata. Selain itu, melalui integrasi teknologi radar, satelit, dan instrumen IKLN, Bakamla RI dapat memetakan serta menindak titik-titik rawan kebocoran ekonomi di jalur perdagangan internasional. Penegakan hukum yang konsisten di laut tidak hanya menyelamatkan aset fisik negara, tetapi juga menciptakan efisiensi anggaran dengan menekan biaya asuransi pelayaran (*high-risk premium*) yang dipicu oleh ketidakpastian keamanan wilayah. Patroli penjagaan laut yang intensif memastikan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam mematuhi regulasi fiskal, sehingga kekayaan laut dapat dikonversi secara maksimal menjadi PNPB yang sah untuk memperkuat struktur anggaran nasional.

Gambar 1: Foto Kegiatan



## KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola maritim melalui optimalisasi IKLN merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Bakamla RI sebagai *leading sector* keamanan laut memegang peranan vital dalam menyinergikan aspek penegakan hukum dan keselamatan di wilayah perairan. Melalui standarisasi IKLN yang komprehensif, kepastian hukum di laut dapat ditingkatkan, sehingga mampu menekan berbagai praktik ilegal seperti *IUU Fishing* dan penyelundupan yang selama ini mengancam stabilitas nasional.

Sinergi antara stabilitas keamanan maritim dengan paradigma Ekonomi Biru terbukti menjadi instrumen strategis dalam penyelamatan keuangan negara. Kehadiran patroli dan pengawasan yang efektif secara langsung berkontribusi pada peningkatan PNBPN serta penyelamatan keuangan negara akibat aktivitas maritim yang tidak terpantau. Dengan melindungi sumber daya dan menjamin kelestarian ekosistem laut, keamanan maritim memastikan bahwa aset ekonomi nasional dapat dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung pendapatan negara yang lebih stabil dan terukur.

Secara lebih luas, efektivitas kinerja Bakamla RI dan implementasi IKLN membawa keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat maritim, khususnya nelayan dan pengusaha lokal di wilayah pesisir. Lingkungan laut yang aman dan bersih dari polusi menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya tarik pariwisata bahari, serta mendorong pertumbuhan sektor bioteknologi laut. Dengan demikian, pengabdian ini menegaskan bahwa transformasi keamanan maritim yang kuat bukan hanya tentang pertahanan wilayah, melainkan mesin penggerak kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berdampak luas bagi kemandirian bangsa.

## REFERENSI

- Bakamla. (2023). *Booklet Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)*.  
Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164.  
Dahuri, R. (2015). Implementasi Ekonomi Biru untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Jakarta: IPB Press.  
Farhani, A. (2022). *Roadmap Masa Depan Indonesia Melalui Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber*

- Daya Alam Kelautan Bagi Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat.* 6, 25–39.
- Karuppiah, K. (2025). *Pathways to a Sustainable Blue Economy : Exploring Its Barriers in an Emerging Economy.* 2019, 6095–6110. <https://doi.org/10.1002/bse.4294>
- Manggala, G., & Airlangga, U. (2025). *STRATEGI POROS MARITIM DUNIA DALAM MEWUJUDKAN PENGEMBALIAN IDENTITAS INDONESIA SEBAGAI BANGSA.* 9(1), 116–138. <https://doi.org/10.32787/ijir.v9i1.656>
- María, R., Vázquez, M., García, J. M., & Valenciano, J. D. P. (2021). Challenges of the Blue Economy : evidence and research trends. *Environmental Sciences Europe*, 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12302-021-00502-1>
- Pauli, G. (2010). The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs. *NM: Paradigm Publications.*
- Priye, R., Sahu, K., & Doppalapudi, R. (2025). *Blue Economy : Framework for Integrating Economic Growth with Marine Ecosystem.* 10(1), 165–174.
- Rudolph, T. B., Ruckelshaus, M., Allison, E. H., Österblom, H., Mbatha, P., Swilling, M., & Gelcich, S. (2020). A transition to sustainable ocean governance. *Nature Communications*, 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17410-2>
- Scarpello, F. (2020). “Susi Versus the rest: the political economy of the fisheries industry in Indonesia during Jokowi’s first term,.” *Asian J. Polit. Sci.*, 28(2)(122–140).
- Vreÿ, F. (2017). A Blue Economy for Africa: Between the Architecture and the Strategy. *Scientia Militaria: South African. Journal of Military Studies*, 45(2), 1–22.
- Wenhai, L., Cusack, C., Baker, M., Tao, W., Mingbao, C., Paige, K., Xiaofan, Z., Levin, L., Escobar, E., Amon, D., Yue, Y., & Reitz, A. (2019). *Successful Blue Economy Examples With an Emphasis on International Perspectives.* 6(June), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00261>